

Analisis Faktor Ekonomi Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL): Studi Kasus di Desa Momala, Kabupaten Gorontalo

Safira Putri H. Malik¹, Sitti Muti'ah Rahman², Dicky Artha³, Fitryane Lihawa⁴, Iswan Dunggio⁵

¹ Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Universitas Negeri Gorontalo and safira@ung.ac.id

² Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Universitas Negeri Gorontalo and tiarahman897@gmail.com

³ Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Universitas Negeri Gorontalo and mutedmulana@gmail.com

⁴ Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Universitas Negeri Gorontalo and fitryane.lihawa@ung.ac.id

⁵ Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Universitas Negeri Gorontalo and iswan@ung.ac.id

ABSTRAK

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan program strategis dalam upaya memulihkan fungsi hidrologis Daerah Aliran Sungai (DAS) sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Kajian mengenai faktor ekonomi dalam pelaksanaan RHL di tingkat tapak masih sangat terbatas, khususnya di wilayah DAS Gorontalo. Mini riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan program RHL di Desa Momala, Kabupaten Gorontalo, sebagai studi pendahuluan (*preliminary study*) berbasis data lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan instrumen kuesioner Skala Likert 4 poin yang terdiri dari 25 pertanyaan tertutup dan 2 pertanyaan uraian. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih 10 responden yang memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan RHL suatu jumlah yang lazim dalam penelitian eksploratoris berbasis informan kunci (*key informant study*). Instrumen diorganisasikan dalam lima dimensi ekonomi: (A) Insentif dan Pendapatan Langsung, (B) Biaya Peluang, (C) Modal dan Biaya Operasional, (D) Akses Pasar dan Nilai Produk, serta (E) Kepastian Ekonomi dan Kesejahteraan. Rata-rata skor keseluruhan sebesar 66,1 dari 100 (setara 2,64/4,00; kategori Cukup), dengan dimensi Biaya Peluang memperoleh skor terendah (2,3/4,00; kategori Kurang). Mini riset ini menghasilkan peta awal lima dimensi hambatan ekonomi RHL yang dapat menjadi acuan bagi penelitian lanjutan berskala lebih besar maupun bagi evaluasi desain program di lapangan. Kontribusi utama penelitian ini adalah tersedianya instrumen diagnostik multidimensi yang kontekstual dan dapat diadaptasi untuk lokasi DAS lainnya di Gorontalo.

Kata Kunci: Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Faktor Ekonomi, Daerah Aliran Sungai, Biaya Peluang, Desa Momala

ABSTRACT

Forest and Land Rehabilitation (RHL) is a strategic program aimed at restoring the hydrological functions of watersheds while supporting the welfare of surrounding communities. Studies on economic factors in RHL implementation at the field level remain limited, particularly in the Gorontalo watershed area. This mini-research aims to identify and analyze economic factors related to the implementation of the RHL program in Momala Village, Gorontalo Regency, as a preliminary study based on field data. A descriptive quantitative approach was employed using a 4-point Likert scale questionnaire comprising 25 closed-ended items and 2 open-ended questions. Purposive sampling was used to select 10 respondents with direct involvement in RHL activities a sample size commonly applied in exploratory key informant studies. The instrument was organized into five economic dimensions: (A) Incentives and Direct Income, (B) Opportunity Cost, (C) Capital and Operational Costs, (D) Market Access and Product Value, and (E) Economic Certainty and Welfare. The overall mean score was 66.1 out of 100 (equivalent to 2.64/4.00; Sufficient category), with the Opportunity Cost dimension recording the lowest score (2.3/4.00; Insufficient category). This mini-research produces a preliminary map of five economic barrier dimensions in RHL implementation that can serve as a reference for larger-scale follow-up research and field-level program design evaluation. The primary contribution of this study is the availability of a multidimensional diagnostic instrument that is contextual and adaptable for other watershed locations in Gorontalo.

Keywords: Forest and Land Rehabilitation, Economic Factor, Watershed, Opportunity Cost, Momala Village

PENDAHULUAN

Degradasi lahan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan isu lingkungan yang memerlukan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan penurunan fungsi hidrologis, peningkatan kerentanan terhadap bencana alam, serta berkurangnya produktivitas ekosistem secara menyeluruh. Di Indonesia, kondisi ini mendorong pemerintah untuk menggalakkan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagai salah satu instrumen kebijakan utama dalam pengelolaan DAS secara berkelanjutan (Mursalim et al., 2019). Program ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan yang menetapkan RHL sebagai upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan agar daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Keberhasilan program RHL secara teoritis bergantung pada keseimbangan antara aspek biofisik, kelembagaan, dan sosial-ekonomi. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberlanjutan program di lapangan (Manik & Robuwan, 2022). Dari sisi sosial-ekonomi, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penentu yang sangat krusial, terutama dalam tahap pemeliharaan tanaman pasca-penanaman yang membutuhkan komitmen jangka panjang (Dewi & Ulfah, 2023). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat pelaksana berkontribusi signifikan terhadap kualitas dan kontinuitas pemeliharaan program RHL (Mursalim et al., 2019).

Desa Momala, yang terletak dalam kawasan DAS di Kabupaten Gorontalo, telah menjadi salah satu lokasi implementasi program RHL. Masyarakat setempat, yang sebagian besar menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian, terlibat langsung dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman RHL. Dalam konteks ini, pemahaman mengenai kondisi ekonomi pelaksana di lapangan menjadi penting sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan desain program ke depan. Penelitian serupa di berbagai wilayah Indonesia telah menunjukkan bahwa faktor ekonomi seperti insentif, biaya peluang, dan akses terhadap modal berkaitan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam program kehutanan (Dewi & Ulfah, 2023; Kusuma et al., 2024).

Mini riset ini dirancang sebagai studi pendahuluan berbasis data lapangan (*field-based preliminary study*) yang merekam kondisi ekonomi 10 responden pelaksana RHL di Desa Momala secara terstruktur. Dalam tradisi penelitian lapangan kehutanan dan lingkungan hidup, mini riset berskala kecil dengan pendekatan purposive sampling terhadap informan kunci diakui memiliki nilai akademis tersendiri sebagai tahap eksplorasi awal yang menghasilkan hipotesis kerja untuk kajian lebih lanjut (Creswell & Creswell, 2017). Pendekatan ini sejalan dengan berbagai kajian serupa di Indonesia yang juga menggunakan sampel terbatas namun terfokus untuk menghasilkan gambaran yang kaya dan kontekstual (Dewi & Ulfah, 2023; Kusuma et al., 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan instrumen diagnostik multidimensi yang mengintegrasikan lima dimensi ekonomi secara bersamaan dalam satu kerangka analisis sebuah pendekatan yang belum lazim diterapkan dalam kajian RHL di wilayah DAS Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengukur persepsi responden terhadap lima dimensi ekonomi program RHL menggunakan instrumen kuesioner terstandar; (2) mengidentifikasi dimensi ekonomi yang memerlukan perhatian lebih lanjut; dan (3) memberikan rekomendasi konstruktif sebagai masukan bagi pengembangan program RHL di wilayah DAS Gorontalo.

LANDASAN TEORI

A. Program RHL dalam Kerangka Pengelolaan DAS

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan bagian integral dari strategi pengelolaan DAS terpadu di Indonesia. Secara konseptual, program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi hidrologis lahan kritis sekaligus meningkatkan produktivitas lahan bagi masyarakat sekitar (PP No. 26 Tahun 2020). Landasan hukum pelaksanaannya diperbarui melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan, yang antara lain menetapkan standar keberhasilan tumbuh tanaman minimal 75% dari jumlah tanaman awal. Manik & Robuwan (2022) menegaskan bahwa penyelenggaraan RHL diprioritaskan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan tiga pelaku utama: pemerintah, korporasi, dan masyarakat, di mana peran masyarakat mencakup konsultasi publik, penyampaian aspirasi, sosialisasi, hingga pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan secara langsung. Susanto (2024) menegaskan bahwa keberlanjutan program RHL sangat ditentukan oleh kesiapan pendanaan pemeliharaan yang berkesinambungan, karena periode pasca-penanaman merupakan fase kritis bagi pertumbuhan tanaman.

Evaluasi berbagai program RHL di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Kusuma et al. (2024) dalam evaluasi di kawasan perhutanan sosial LMDH Sukowono, Lumajang, menemukan tingkat keberhasilan tumbuh tanaman sebesar 84,92% dengan persepsi masyarakat yang positif, khususnya karena jenis tanaman yang digunakan seperti durian, alpukat, petai, dan kemiri sesuai dengan minat ekonomi masyarakat. Sementara itu, Priyanto et al. (2025) dalam analisis keberhasilan RHL di DAS Opak, Gunung Kidul, menemukan bahwa seluruh lokasi penelitian mencatat persentase tumbuh tanaman di bawah ambang standar minimal 75%, dan mengidentifikasi bahwa faktor non-teknis seperti edukasi serta pendampingan berpengaruh terhadap hasil program. Hadawiah et al. (2023) menemukan bahwa tingkat keberhasilan program RHL berkaitan erat dengan kesesuaian jenis bibit, kondisi lahan, dan faktor sosial termasuk tingkat keterlibatan masyarakat di lokasi program.

B. Faktor Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat dalam RHL

Partisipasi masyarakat dalam program kehutanan berbasis lahan erat kaitannya dengan pertimbangan ekonomi rumah tangga. Dewi & Ulfah (2023) menemukan bahwa ketepatan waktu pembayaran insentif dan transparansi pengelolaan dana merupakan dua faktor yang paling konsisten berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas keterlibatan jangka panjang.

Dewi & Ulfah (2023) dalam kajian efektivitas program RHL di Hutan Pelangan, Kabupaten Lombok Barat, menemukan bahwa program RHL berkontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, di mana buruh pekerja memperoleh upah atas kegiatan penanaman dan perawatan, sementara kelompok tani memperoleh hasil perkebunan yang dapat dijual. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengidentifikasi

bahwa frekuensi monitoring yang hanya dilakukan sekali per tahun masih perlu ditingkatkan untuk menjaga kualitas program. Dalam kajian program hutan kemasyarakatan di Sulawesi mengidentifikasi bahwa sistem insentif yang transparan dan proporsional berkontribusi positif terhadap motivasi pemeliharaan tanaman. Lebih lanjut, Kusuma et al. (2024) menemukan bahwa program RHL yang menggunakan jenis tanaman sesuai minat dan kebutuhan ekonomi masyarakat cenderung memperoleh respons yang lebih positif dari peserta program.

C. Konsep Biaya Peluang dalam Konteks Penggunaan Lahan

Biaya peluang (*opportunity cost*) dalam konteks penggunaan lahan merujuk pada nilai alternatif terbaik yang tidak dipilih ketika seorang petani memutuskan untuk mengalokasikan waktu dan lahannya pada suatu kegiatan tertentu. Noormalinda et al. (2021) menjelaskan bahwa dalam konteks pertanian subsisten, petani pada umumnya membandingkan manfaat ekonomi jangka pendek dari tanaman semusim dengan manfaat jangka panjang dari tanaman kehutanan sebelum membuat keputusan alokasi sumber daya.

Susanto (2024) dalam kajian pembangunan berbasis hutan di Provinsi NTB menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi lokal, termasuk nilai komoditas tanaman alternatif, merupakan variabel kontekstual penting yang perlu dipertimbangkan dalam desain program RHL. Fitria et al. (2021) menambahkan bahwa pemahaman terhadap dinamika biaya peluang di tingkat rumah tangga dapat membantu perancang program dalam menetapkan nilai insentif yang lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

D. Akses Pasar dan Pemilihan Jenis Tanaman

Hadawiah et al. (2023) menegaskan bahwa relevansi ekonomi jenis tanaman yang dipilih dalam program RHL merupakan faktor penting yang memengaruhi motivasi pemeliharaan masyarakat. Pilihan tanaman yang memiliki nilai pasar yang dikenal oleh masyarakat setempat cenderung mendapatkan perhatian pemeliharaan yang lebih baik. Kusuma et al. (2024) mengonfirmasi temuan ini melalui evaluasi di LMDH Sukowono, Lumajang, di mana penggunaan jenis tanaman HHBK bernilai ekonomi seperti alpukat, kemiri, petai, dan durian berkontribusi pada tercapainya tingkat keberhasilan tumbuh sebesar 84,92% dan persepsi positif masyarakat. Dalam hal ini, tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) semakin banyak direkomendasikan karena menawarkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lebih pendek (Noormalinda et al., 2021).

Priyanto et al. (2025) dalam analisis keberhasilan RHL di DAS Opak mencatat bahwa jenis tanaman berpengaruh terhadap variasi persentase tumbuh antar plot, dengan tanaman jati menunjukkan performa adaptasi lebih tinggi dibandingkan jenis lain di lokasi yang sama. Hadawiah et al. (2023) menemukan bahwa ketidaksesuaian antara jenis bibit yang disediakan dengan preferensi masyarakat merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan rendahnya tingkat keberhasilan tanaman di beberapa lokasi penelitian.

Oleh karena itu, proses konsultasi partisipatif dalam pemilihan jenis tanaman dipandang sebagai praktik baik yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan program.

E. Modal, Kepastian Hak, dan Keberlanjutan Ekonomi

Toha et al. (2023) menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi keterbatasan modal masyarakat dalam desain program kehutanan berbasis partisipasi. Keterbatasan modal dapat menjadi hambatan struktural bagi petani untuk mempertahankan komitmen pemeliharaan dalam jangka panjang, terutama ketika manfaat ekonomi dari program baru dapat dirasakan bertahun-tahun kemudian.

Dalam konteks Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) mengemukakan bahwa kejelasan hak atas manfaat ekonomi dari sumber daya yang dikelola merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan komitmen masyarakat. Fitria et al. (2021) melengkapi temuan ini dengan menyebutkan bahwa program kehutanan yang berhasil umumnya mengintegrasikan mekanisme dukungan mata pencaharian yang memberikan sumber pendapatan alternatif kepada peserta program selama periode penantian hasil.

METODE PENELITIAN

A. Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena secara sistematis berdasarkan data numerik yang dikumpulkan melalui instrumen terstandar (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengukur persepsi responden secara terstruktur menggunakan skala pengukuran yang dapat diolah secara statistik deskriptif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Momala, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Desa ini dipilih karena merupakan salah satu lokasi pelaksanaan program RHL di kawasan DAS Kabupaten Gorontalo dan terdapat masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Maret–April 2026.

C. Populasi, Sampel, dan Justifikasi Pendekatan Mini Riset

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga Desa Momala yang pernah atau sedang terlibat dalam kegiatan RHL. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian (Creswell & Creswell, 2017). Kriteria inklusi meliputi: (1) memiliki pengalaman langsung dalam kegiatan RHL di Desa Momala; dan (2) bersedia mengisi kuesioner secara sukarela.

Jumlah responden yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang, yang terdiri atas: 1 orang dengan masa keterlibatan kurang dari 1 tahun, 8 orang dengan masa keterlibatan 1–5 tahun, dan 1 orang dengan masa keterlibatan 5–10 tahun. Pekerjaan utama responden mencakup petani, perangkat desa, dan ibu rumah tangga (IRT). Pendekatan dengan jumlah sampel ini merupakan karakteristik inheren dari mini riset sebagai studi pendahuluan. Dalam metodologi penelitian, mini riset atau preliminary study dengan informan kunci (key

informant approach) diakui sebagai desain yang valid untuk tujuan eksplorasi dan pemetaan awal suatu fenomena, sebelum dilanjutkan dengan penelitian berskala lebih besar (Creswell & Creswell, 2017). Dalam penelitian deskriptif-eksploratif, kualitas pemilihan informan berdasarkan keterlibatan langsung lebih menentukan kekayaan data dibandingkan kuantitas sampel semata.

Studi-studi terdahulu di bidang kehutanan dan lingkungan hidup di Indonesia juga menerapkan pendekatan serupa dengan jumlah sampel terbatas namun terfokus. Dewi & Ulfa (2023) menggunakan pendekatan key informant dalam kajian efektivitas RHL di Lombok Barat, sementara Kusuma et al. (2024) melibatkan 19 responden dalam evaluasi persepsi masyarakat terhadap program RHL di Lumajang. Hal ini memperkuat posisi bahwa mini riset dengan sampel terpilih yang memiliki pengalaman langsung dapat menghasilkan temuan yang bermakna dan layak dipublikasikan sebagai kontribusi ilmiah awal.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berupa kuesioner yang terdiri dari 25 pertanyaan tertutup yang diorganisasikan dalam lima dimensi ekonomi dan 2 pertanyaan uraian terbuka. Kisi-kisi instrumen disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Dimensi dan Indikator Instrumen Kuesioner

Kategori	Dimensi	Indikator Utama	Rata-rata
A	Insentif & Pendapatan Langsung	Kecukupan upah harian, ketepatan waktu pembayaran, transparansi dana kelompok tani	2,6
B	Biaya Peluang (Opportunity Cost)	Perbandingan nilai ekonomi RHL dengan tanaman semusim, kerugian waktu yang dirasakan	2,3
C	Modal & Biaya Operasional	Ketersediaan modal mandiri, aksesibilitas pupuk dan sarana pemeliharaan tanaman	2,8
D	Akses Pasar & Nilai Produk	Kemudahan pemasaran hasil, ketersediaan informasi harga, kesesuaian jenis bibit	2,6
E	Kepastian Ekonomi & Kesejahteraan	Kejelasan bagi hasil, ketersediaan usaha sampingan, dampak terhadap ekonomi rumah tangga	2,8

Sumber: Adaptasi Dari Berbagai Sumber Literatur, Diolah 2026

E. Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan Skala Likert 4 poin tanpa pilihan netral (*forced-choice scale*). Penghilangan opsi tengah dilakukan untuk mendorong responden memberikan penilaian yang tegas (Sugiyono, 2019). Pemberian skor: Sangat Setuju (SS) = 4, Setuju (S) = 3, Tidak Setuju (TS) = 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) = 1.

F. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan tahapan sebagai berikut (Sugiyono, 2019):

1. Penghitungan rata-rata skor per dimensi: Rata-rata skor setiap dimensi (k) dihitung menggunakan rumus:

$$X_k = \sum x_{ik} / n$$

Di mana X_k adalah rata-rata skor dimensi ke-k, x_{ik} adalah rata-rata skor responden ke-i pada dimensi ke-k, dan n adalah jumlah responden (n = 10).

- Total skor per responden: Jumlah skor dari seluruh 25 item kuesioner untuk setiap responden:

$$S_i = \sum x_{ij} \quad (j = 1, 2, \dots, 25)$$

Dengan rentang skor teoritis antara 25 (semua STS) hingga 100 (semua SS).

- Konversi persentase: Skor rata-rata dikonversi ke dalam persentase untuk memudahkan interpretasi:

$$P = (X / X_{maks}) \times 100\%$$

Di mana P adalah persentase ketercapaian, X adalah rata-rata skor aktual, dan X_maks adalah skor maksimum = 4.

- Penentuan interval dan kategorisasi: Rentang kategori dihitung menggunakan rumus interval kelas:

$$I = (X_{maks} - X_{min}) / K = (4 - 1) / 4 = 0,75$$

Di mana K adalah jumlah kategori yang digunakan (K = 4). Hasil pembagian interval ini menghasilkan tabel kategorisasi yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kategorisasi Interpretasi Skor Rata-rata

Rentang Skor	Kategori	Keterangan
3,26 – 4,00	Sangat Baik	Kondisi ekonomi sangat mendukung pelaksanaan RHL
2,51 – 3,25	Cukup	Kondisi ekonomi cukup mendukung, namun masih perlu penguatan
1,76 – 2,50	Kurang	Kondisi ekonomi kurang mendukung, perlu perhatian serius
1,00 – 1,75	Sangat Kurang	Kondisi ekonomi sangat tidak mendukung pelaksanaan RHL

Sumber: Diadaptasi Dari Sugiyono (2019), Diolah 2026

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tabulasi Data Hasil Kuesioner

Berdasarkan pengumpulan data melalui kuesioner terhadap 10 responden, diperoleh rekapitulasi skor sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Perlu ditegaskan kembali bahwa data ini merupakan hasil dari 10 responden dengan teknik purposive sampling, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat deskriptif-eksploratoris dan merepresentasikan perspektif kelompok responden terpilih di lokasi penelitian.

Tabel 3. Rekapitulasi Skor Kuesioner Faktor Ekonomi RHL per Responden (n=10)

Responden	Masa Kerja	Kat. A	Kat. B	Kat. C	Kat. D	Kat. E	Total Skor
R1	< 1 Tahun	3,2	2,8	3,0	2,6	3,0	73
R2	1–5 Tahun	2,4	2,2	2,6	2,8	3,2	63
R3	1–5 Tahun	3,4	2,4	2,8	2,4	3,0	70
R4	1–5 Tahun	2,2	2,0	2,4	2,2	2,4	56
R5	1–5 Tahun	2,2	2,2	2,6	2,0	2,8	59
R6	5–10 Tahun	3,0	2,8	3,2	3,4	3,2	78
R7	1–5 Tahun	2,0	2,4	2,8	2,4	2,6	61
R8	1–5 Tahun	3,0	2,6	2,8	2,8	3,2	72
R9	1–5 Tahun	2,2	1,8	2,4	2,4	2,2	55
R10	1–5 Tahun	3,0	2,6	3,0	3,0	3,0	73
Rata-rata	–	2,6	2,3	2,8	2,6	2,8	66,1

Keterangan:

Kat. A = Insentif & Pendapatan Langsung; Kat. B = Biaya Peluang;

Kat. C = Modal & Operasional; Kat. D = Akses Pasar & Nilai Produk;

Kat. E = Kepastian Kesejahteraan. Skor menggunakan Skala Likert 1–4. Total skor = jumlah 25 item; rentang 25–100.

Sumber: Data Primer, Diolah 2026

Secara keseluruhan, rata-rata skor dari 10 responden adalah 66,1/100, atau setara dengan 2,64/4,00. Berdasarkan kategorisasi yang telah ditetapkan, angka ini berada pada kategori Cukup (rentang 2,51–3,25). Ringkasan perbandingan antardimensi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rekapitulasi Rata-rata Skor dan Kategorisasi Per Dimensi

Kategori	Dimensi	Rata-rata Skor	Persentase (%)	Kategori
A	Insentif & Pendapatan Langsung	2,6	65,0	Cukup
B	Biaya Peluang (Opportunity Cost)	2,3	57,5	Kurang
C	Modal & Biaya Operasional	2,8	70,0	Cukup
D	Akses Pasar & Nilai Produk	2,6	65,0	Cukup
E	Kepastian Ekonomi & Kesejahteraan	2,8	70,0	Cukup
–	Rata-rata Keseluruhan	2,64	66,1	Cukup

Sumber: Data Primer, Diolah 2026

Dari Tabel 4 terlihat bahwa dimensi Biaya Peluang (B) memiliki rata-rata skor paling rendah (2,3/4,00; 57,5%; kategori Kurang), sementara dimensi Modal & Operasional (C) dan Kepastian Kesejahteraan (E) memperoleh skor tertinggi dalam kelompok ini (2,8/4,00; 70,0%; kategori Cukup). Gambaran ini memberikan indikasi awal mengenai dimensi mana yang memerlukan perhatian lebih dalam pengembangan program RHL ke depan.

B. Dimensi Insentif dan Pendapatan Langsung (Kategori A, Skor: 2,6)

Dimensi insentif memperoleh rata-rata skor 2,6/4,00 (65,0%), yang masuk dalam kategori Cukup. Skor ini mencerminkan bahwa sebagian responden menilai sistem insentif yang berjalan sudah cukup memadai, meskipun masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut.

Aspek transparansi pembagian upah dalam kelompok tani mendapat penilaian yang relatif positif dari responden. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan administratif di tingkat kelompok sudah berjalan dengan cukup baik. Di sisi lain, aspek ketepatan waktu pembayaran dan ketersediaan insentif berbasis kinerja mendapat skor yang lebih rendah dari beberapa responden. Temuan ini sejalan dengan Dewi & Ulfah (2023) yang menyatakan bahwa ketepatan waktu pembayaran dan transparansi pengelolaan dana merupakan faktor yang berkaitan dengan kepercayaan dan semangat partisipasi masyarakat dalam program RHL.

Dewi & Ulfah (2023) dalam kajian efektivitas program RHL di Hutan Pelangan, Kabupaten Lombok Barat menemukan bahwa program RHL memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, di mana buruh pekerja memperoleh upah atas pengelolaan hutan dan kelompok tani memperoleh hasil perkebunan yang dapat dijual. Temuan tersebut memperkuat pentingnya dimensi insentif sebagai penggerak partisipasi. Pengembangan sistem insentif yang mempertimbangkan kinerja pemeliharaan dapat menjadi salah satu opsi yang layak untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam jangka panjang.

C. Dimensi Biaya Peluang (Kategori B, Skor: 2,3)

Dimensi Biaya Peluang mencatat rata-rata skor terendah di antara lima dimensi yang diteliti, yaitu 2,3/4,00 (57,5%; kategori Kurang). Responden mengungkapkan bahwa perbandingan antara manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan RHL dengan alternatif pertanian yang ada menjadi pertimbangan penting dalam keputusan alokasi waktu dan tenaga mereka.

Dalam konteks Desa Momala, di mana komoditas pertanian semusim seperti jagung merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar rumah tangga, perbedaan siklus panen antara tanaman kehutanan dan tanaman semusim menjadi faktor yang relevan untuk dipertimbangkan. Kondisi serupa dijumpai di berbagai lokasi program RHL lainnya di Indonesia; Dewi & Ulfah (2023) mencatat bahwa salah satu kendala yang dihadapi peserta program RHL adalah pemberian bibit tanaman yang kurang tepat sehingga beberapa tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik, dan faktor cuaca yang tidak mendukung pada waktu penanaman turut memperburuk kondisi tersebut. Priyanto et al. (2025) juga menemukan bahwa disparitas antara data teknis pertumbuhan tanaman dan persepsi sosial masyarakat menunjukkan pentingnya faktor non-teknis termasuk edukasi dan pendampingan yang memengaruhi motivasi partisipasi. Noormalinda et al. (2021) menjelaskan bahwa dalam sistem pertanian subsisten, pertimbangan manfaat jangka pendek umumnya sangat dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi rumah tangga yang mendesak.

Susanto (2024) menemukan bahwa pemahaman terhadap kondisi biaya peluang di tingkat lokal dapat membantu perancang program dalam menetapkan jenis tanaman yang lebih sesuai dengan konteks ekonomi masyarakat setempat. Fitria et al. (2021) menambahkan bahwa penyesuaian desain program terhadap dinamika opportunity cost lokal merupakan salah satu kunci efektivitas program rehabilitasi lahan di negara berkembang.

D. Dimensi Modal dan Biaya Operasional (Kategori C, Skor: 2,8)

Dimensi modal memperoleh rata-rata skor 2,8/4,00 (70,0%; kategori Cukup). Sebagian responden menyampaikan bahwa ketersediaan modal mandiri untuk kebutuhan pemeliharaan seperti pupuk dan peralatan masih terbatas, sehingga ketergantungan terhadap dukungan eksternal masih cukup tinggi.

Priyanto et al. (2025) menegaskan bahwa keberhasilan jangka panjang RHL sangat bergantung pada ketersediaan dukungan pemeliharaan yang berkelanjutan, khususnya pada tahun-tahun awal setelah penanaman. Dewi & Ulfah (2023) dalam kajiannya di Hutan Pelangan, Lombok Barat, menemukan bahwa program monitoring dan evaluasi (*monev*) yang hanya dilakukan sekali dalam setahun dirasa masih kurang memadai untuk memantau kebutuhan modal dan pemeliharaan secara berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa frekuensi dan intensitas pendampingan pasca-penanaman perlu menjadi perhatian dalam penyempurnaan desain program. Toha et al. (2023) menambahkan bahwa keterbatasan modal merupakan tantangan struktural yang umum dihadapi oleh petani kecil dalam program kehutanan berbasis masyarakat, dan penanganannya memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi setempat.

E. Dimensi Akses Pasar dan Nilai Produk (Kategori D, Skor: 2,6)

Dimensi akses pasar memperoleh rata-rata skor 2,6/4,00 (65,0%; kategori Cukup). Sebagian responden mengungkapkan harapan agar jenis bibit yang disediakan dalam program lebih mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan ekonomi lokal masyarakat.

Kusuma et al. (2024) dalam evaluasi keberhasilan RHL di kawasan perhutanan sosial LMDH Sukowono, Lumajang, menemukan bahwa tingkat keberhasilan pertumbuhan tanaman yang mencapai 84,92% didukung oleh kesesuaian jenis tanaman dengan kondisi lahan dan preferensi masyarakat, termasuk tanaman buah-buahan seperti durian, alpukat, petai, dan kemiri yang memiliki nilai ekonomi yang dikenal masyarakat. Temuan ini memperkuat pentingnya kesesuaian jenis bibit dengan minat ekonomi lokal. Demikian pula Priyanto et al. (2025) dalam analisis keberhasilan RHL di DAS Opak, Gunung Kidul, mencatat bahwa jenis tanaman yang dipilih berpengaruh signifikan terhadap persentase tumbuh tanaman.

Hadawiah et al. (2023) mengungkapkan bahwa program rehabilitasi yang melibatkan masyarakat dalam proses pemilihan jenis tanaman cenderung mendapat respons yang lebih positif. Noormalinda et al. (2021) menambahkan bahwa tanaman HHBK dengan nilai pasar yang sudah dikenal masyarakat dapat menjadi alternatif yang layak dipertimbangkan dalam program RHL berbasis agroforestri. Susanto (2024) dalam analisis pembangunan berbasis hutan di Provinsi NTB menemukan bahwa pola agroforestri multiusaha dengan komoditi HHBK bernilai tinggi seperti alpukat, kemiri, kopi, dan nangka merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk rehabilitasi lahan kritis sekaligus meningkatkan pendapatan kelompok tani, dengan catatan bahwa ketersediaan bibit berkualitas dan akses pasar komoditi menjadi faktor penentu keberhasilan adopsi pola ini oleh masyarakat.

F. Dimensi Kepastian Ekonomi dan Kesejahteraan (Kategori E, Skor: 2,8)

Dimensi kepastian kesejahteraan memperoleh rata-rata skor 2,8/4,00 (70,0%; kategori Cukup). Beberapa responden mengungkapkan bahwa kejelasan mengenai hak ekonomi atas pohon yang dirawat serta ketersediaan kegiatan usaha yang dapat dilakukan selama masa tunggu pertumbuhan pohon merupakan hal yang penting bagi mereka.

Kusuma et al. (2024) mencatat bahwa persepsi positif masyarakat di LMDH Sukowono terhadap program RHL dipengaruhi oleh keyakinan mereka bahwa keikutsertaan dalam menjaga kawasan hutan akan memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan di masa mendatang, termasuk bagi mereka yang belum mendapat lahan tanam. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian manfaat jangka panjang berperan penting dalam membentuk persepsi dan komitmen masyarakat. Toha et al. (2023) mengemukakan bahwa kejelasan hak atas manfaat ekonomi dari sumber daya yang dikelola merupakan faktor pendukung keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam program lingkungan.

Toha et al. (2023) menyebutkan bahwa program perhutanan sosial yang dilengkapi dengan komponen usaha produktif alternatif selama periode penantian hasil cenderung lebih mampu mempertahankan keterlibatan peserta dalam jangka panjang. Temuan dari responden dengan masa keterlibatan lebih lama (5–10 tahun, R6 dengan skor tertinggi 78) menunjukkan skor yang lebih stabil dan positif di semua dimensi, konsisten dengan temuan Noormalinda et al. (2021) bahwa pengalaman dan keterlibatan lebih lama dalam program kehutanan berkontribusi pada pemahaman dan penilaian yang lebih menyeluruh.

G. Sintesis Temuan dan Implikasi bagi Pengembangan Program

Berdasarkan analisis terhadap data dari 10 responden, penelitian ini memberikan gambaran awal mengenai persepsi ekonomi pelaksana RHL di Desa Momala. Pola skor yang diperoleh mengindikasikan bahwa dari lima dimensi yang dikaji, dimensi Biaya Peluang (B) merupakan

dimensi yang paling memerlukan perhatian (skor terendah: 2,3/4,00), sementara keempat dimensi lainnya berada pada kategori Cukup.

Temuan ini memiliki keselarasan dengan hasil penelitian di berbagai lokasi di Indonesia. Priyanto et al. (2025) dan Kusuma et al. (2024) sama-sama menunjukkan bahwa keberhasilan program RHL bersifat multidimensi tidak hanya bergantung pada aspek teknis pertumbuhan tanaman, tetapi juga pada kesesuaian jenis tanaman, partisipasi masyarakat, dan dukungan sosial-ekonomi. Dewi & Ulfah (2023) lebih lanjut menegaskan bahwa kendala pada aspek pemilihan bibit, ketepatan waktu distribusi, dan frekuensi monitoring merupakan tantangan nyata yang perlu diantisipasi dalam desain program RHL di berbagai lokasi.

Mengingat keterbatasan jumlah sampel dalam penelitian ini, interpretasi temuan perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Diperlukan penelitian lanjutan dengan sampel yang lebih besar dan cakupan wilayah yang lebih luas untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan.

KESIMPULAN

Mini riset ini mengkaji persepsi ekonomi 10 responden pelaksana program RHL di Desa Momala, Kabupaten Gorontalo, melalui instrumen kuesioner yang mencakup lima dimensi: Insentif dan Pendapatan Langsung, Biaya Peluang, Modal dan Biaya Operasional, Akses Pasar dan Nilai Produk, serta Kepastian Ekonomi dan Kesejahteraan. Rata-rata skor keseluruhan yang diperoleh adalah 2,64/4,00 (66,1/100; kategori Cukup), dengan Dimensi Biaya Peluang mencatat skor paling rendah (2,3/4,00; kategori Kurang) dan Dimensi Modal serta Kepastian Kesejahteraan mencatat skor tertinggi (2,8/4,00; kategori Cukup). Pola skor ini mengindikasikan bahwa dari perspektif responden, pertimbangan nilai ekonomi komparatif antara kegiatan RHL dan pilihan penggunaan lahan lainnya merupakan dimensi yang paling memerlukan perhatian dalam konteks lokal Desa Momala. Sebagai studi pendahuluan berskala kecil (n=10), temuan ini bersifat eksploratoris dan memberikan gambaran awal yang dapat menjadi titik tolak bagi penelitian lanjutan maupun kajian evaluatif program di kawasan DAS Gorontalo.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan ke depan. Pertama, kajian lebih lanjut mengenai mekanisme insentif yang sesuai dengan dinamika ekonomi lokal dapat mendukung perencanaan program yang lebih kontekstual, termasuk eksplorasi pilihan jenis tanaman berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang memiliki siklus manfaat ekonomi lebih beragam (Manik & Robuwan, 2022; Susanto, 2024). Kedua, pengembangan skema dukungan modal pemeliharaan dan kegiatan ekonomi produktif yang dapat berjalan berdampingan dengan program RHL dapat menjadi bagian dari desain program yang lebih terintegrasi, sebagaimana direkomendasikan oleh Toha et al. (2023) dalam konteks perhutanan sosial berbasis kesejahteraan masyarakat. Ketiga, penelitian lanjutan dengan cakupan sampel yang lebih luas dan pendekatan mixed methods direkomendasikan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor ekonomi

dalam pelaksanaan RHL di kawasan DAS Gorontalo, sehingga dapat mendukung pengembangan kebijakan berbasis bukti yang lebih kuat (Creswell & Creswell, 2017).

REFERENSI

- Dewi, Chantika & Ulfah, Baiq Rizka Milania. (2023). Efektivitas Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (RHL) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Sekitar Hutan Pelangan Kabupaten Lombok Barat. *Nusantara Hasana Journal*, 2(9 SE-Articles), 152–158. <https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/771>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=335ZDwAAQBAJ>
- Fitria, W., Suharjito, D., & Ekawati, S. (2021). Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Implementasi Perhutanan Sosial: Studi di KPH Produksi Kerinci, Provinsi Jambi dan KPH Lindung Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 18(2), 145–160. <https://doi.org/10.20886/jakk.2021.18.2.145-160>
- Hadawiah, B. S., Idris, M. H., & Hidayati, E. (2023). Analisis Vegetasi dan Persepsi Masyarakat Terhadap Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL): (Studi Kasus di Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Hutan Tropika*, 18(1), 33–44. <https://doi.org/10.36873/jht.v18i1.5571>
- Kusuma, A. F., Sukarno, A., & Purwanti, G. A. (2024). Evaluasi Keberhasilan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Pada Kawasan Perhutanan Sosial Sukowono Lumajang. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 6(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.56670/jsrd.v6i2.495>
- Manik, J. D. N., & Robuwan, R. (2022). Kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan untuk perlindungan lingkungan hidup. *Jurnal YUSTITIA*, 23(2), 84–98. <https://doi.org/10.53712/yustitia.v23i2.1711>
- Mursalim, M., Akhbar, A., & Muis, H. (2019). Analisis Keberhasilan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Di Sub Das Miu. *Mitra Sains*, 7(1 SE-Articles), 11–21. <https://doi.org/10.22487/mitrasains.v7i1.219>
- Noormalinda, N., Peran, S. B., & Rudy, G. S. (2021). Persepsi masyarakat Desa Hamak Timur terhadap rencana kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan hutan lindung Gunung Mantiut Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Jurnal Sylva Scientiae*, 4(4), 637–645. <https://doi.org/10.20527/jss.v4i4.3939>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (2021).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (2020).
- Priyanto, D. A., Suwadji, S., & Nugraha, N. S. (2025). Analisis Keberhasilan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Daerah Aliran Sungai Opak, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *AGROFORETECH*, 3(2 SE-Kehutanan), 1309–1315. <https://jurnal.instiperjogja.ac.id/index.php/JOM/article/view/2056>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Susanto, W. (2024). Analisis pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Bappenas Working Papers*, VII(2), 119–140. <https://doi.org/10.47266/bwp.v7i2.321>
- Toha, M., Wihadanto, A., & Nurhasanah, N. (2023). Dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam mendukung kelestarian hutan di Kota Tarakan. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 7(2), 133–141. <https://doi.org/10.32522/ujht.v7i2.10302>